

Open Government: Studi Kasus di Cotabato Selatan

Syed Agung Afandi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jl. HR. Soebrantas Km. 15 Pekanbaru

e-mail: syedagungafandi@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis tren dan kebijakan open government Cotabato Selatan. Pendekatan kualitatif, metode analisis bibliometrik, dan metode analisis konten digunakan pada penelitian ini. Data penelitian bersumber dari database Scopus, Web of Science, Semantic Scholar, Crossref, dan dokumen kebijakan Cotabato Selatan. Penelitian ini menemukan 127 artikel relevan, 683 sitasi, 13 h-index, dan 24 g-index yang menunjukkan bahwa studi open government Cotabato Selatan memiliki dampak dan produktivitas yang tinggi. Terdapat 2646 total link strength, 668 occurrences, 103 topik, dan 9 klaster pada studi ini. Access information, public participation, open legislation, public access, public service, infrastructure, public monitoring, public information, information openness, dan extractive merupakan topik-topik yang mendominasi. Sedangkan topik-topik penelitian potensial yakni public service, service quality, access, public information, communication, interactive, information openness, information quality, accountability, monitoring, dan evaluation. Saat ini Cotabato Selatan fokus pada komitmen open legislation, public participation in extractives, public monitoring of infrastructure, dan access to information. Komitmen-komitmen tersebut berpotensi menjadikan Cotabato Selatan lebih terbuka.

Kata kunci: Analisis Bibliometrik; Analisis Konten; Open Government; Cotabato Selatan

PENDAHULUAN

Open government menjadi strategi penting untuk reformasi administrasi sehingga mendorong banyak negara di seluruh dunia merancang dan mengimplementasikan inisiatif yang terkait dengan akses informasi, transparansi, partisipasi, dan kolaborasi (Afandi, Afandi, Erdayani, & Afandi, 2023; Afandi, Erdayani, & Afandi, 2024; De Blasio & Selva, 2019; Gil-Garcia, Gasco-Hernandez, & Pardo, 2020). Banyak pemerintah yang telah memperluas konsep open government, misalnya pemerintahan Obama mengumumkan Open Government Directive pada tahun 2009 dan mengambil peran utama dalam membentuk Open Government Partnership (OGP), sebuah upaya multinasional untuk mempromosikan open government di seluruh dunia (Afandi, Afandi, & Anugerah, 2023; Kamaruddin & Afandi, 2024; Moon, 2020; Schmidhuber & Hilgers, 2021).

Open Government Partnership didasarkan pada gagasan bahwa open government lebih mudah diakses, lebih responsif, dan lebih bertanggung jawab kepada warga negara, dan bahwa meningkatkan hubungan antara masyarakat dan pemerintah memiliki manfaat jangka panjang dan eksponensial bagi semua (Afandi, 2024; Erdayani, Afandi, & Afandi, 2023; Ruijter & Meijer, 2020; Tai, 2021). OGP merupakan kemitraan luas yang mencakup anggota di tingkat nasional dan local (Gao, Janssen, & Zhang, 2021; Ingrams, 2020; Ruijter, Détienne, Baker, Groff, & Meijer, 2020).

Menjadi bagian dari OGP local memberikan manfaat untuk mendorong reformasi terbuka yang telah menjadi bagian dari visi dan misi setiap pemerintah local untuk mencapai level akuntabel, responsif, inklusif, dan transparan (Afandi, Afandi, & Erdayani, 2023; Ingrams,

Piotrowski, & Berliner, 2020; Zulfa & Afandi, 2023). Melalui keanggotaan pada komunitas global ini, setiap pemerintah local dapat memperoleh informasi baru tentang penerapan pemerintahan terbuka, serta memungkinkan untuk berbagi pandangan, pengalaman, dan sumber daya untuk mencapai prinsip-prinsip pemerintahan terbuka (Afandi, Erdayani, & Afandi, 2023; Wirtz, Weyerer, & Sch, 2019).

Open Government Partnership telah meluncurkan Program Percontohan Pemerintah Daerah, yang menyadari bahwa banyak inovasi dan reformasi pemerintahan terbuka terjadi di tingkat lokal dimana pemerintah dapat terlibat lebih langsung dengan masyarakat dan menghasilkan banyak layanan publik yang penting. Program percontohan ini dilaksanakan oleh lima belas pemerintah local yakni Austin, Basque Country, Buenos Aires, Elgeyo Marakwet, Jalisco, Kaduna State, La Libertad, Madrid, Paris, São Paulo, Skotlandia, Sekondi-Takoradi, Seoul, Tbilisi, dan Cotabato Selatan.

Adapun Cotabato Selatan merupakan salah satu pemerintah local di Filipina, Filipina adalah satu di antara delapan negara yang berperan utama terhadap terbentuknya Open Government Partnership. Di Filipina, Cotabato Selatan telah berhasil memelopori penerapan program integritas di tingkat pemerintah local melalui program iSouthCotabato atau South Cotabato for Integrity and Jobs. Lingkaran Integritas Cotabato Selatan (SCIC) dibentuk dan telah dikembangkan dua puluh empat mekanisme integritas mengikuti model Web Institusionalisasi Caren Levy. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren open government Cotabato Selatan dan menganalisis komitmen pemerintah local ini dalam penerapan open government.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis bibliometrik dan analisis konten. Analisis bibliometrik merupakan metode untuk menganalisis literatur ilmiah dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu (Donthu, Kumar, Mukherjee, Pandey, & Lim, 2021; Moral-Muñoz, Herrera-Viedma, Santisteban-Espejo, & Cobo, 2020). Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi tren dan menyoroti wawasan kritis yang dihasilkan dari literatur ilmiah (Gaviria-Marin, Merigó, & Baier-Fuentes, 2019; Kulsum et al., 2022). Sedangkan analisis konten merupakan metode yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami isu atau topik tertentu dengan menganalisis isi dokumen (Subedi, Nyamasvisva, & Pokharel, 2022; Wang & Shepherd, 2020).

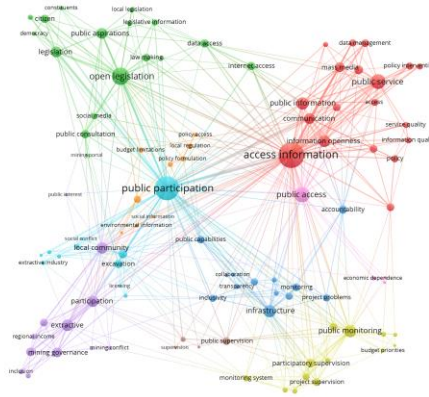
Pada analisis bibliometrik, data yang digunakan diperoleh dari database Scopus, Web of Science, Semantic Scholar, dan Crossref menggunakan Publish or Perish dengan kata kunci "South Cotabato open government". Data tersebut disimpan dalam format RIS, diseleksi menggunakan OpenRefine, dan dianalisis menggunakan VOSviewer untuk memperoleh peta bibliometrik. Sedangkan untuk analisis konten, data bersumber dari dokumen kebijakan open government Cotabato Selatan yang diperoleh dari website pemerintah. Data selanjutnya dikategorikan dan diinterpretasi sehingga diperoleh hasil analisis kebijakan open government Cotabato Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tren Open Government Cotabato Selatan

Pada studi ini ditemukan 127 artikel relevan, 683 sitasi, 13 h-index, dan 24 g-index yang menunjukkan bahwa artikel open government Cotabato Selatan diminati, memiliki

dampak, dan memiliki produktivitas yang tinggi. H-index dan g-index familiar digunakan untuk mengukur produktivitas maupun dampak dari artikel yang diterbitkan. Perbedaannya adalah h-index didasarkan pada jumlah artikel yang dihasilkan dan jumlah sitasi yang diterima, sedangkan g-indeks dihitung berdasarkan distribusi sitasi dan rata-rata jumlah sitasi.

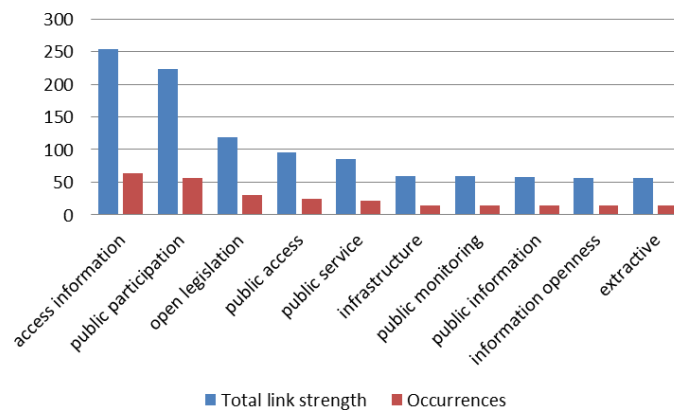


VCStviewer

Gambar 1. Network Visualization

(Sumber: Diproses oleh Penulis)

Gambar di atas terbentuk berdasarkan keyword artikel yang digunakan pada penelitian ini. Tidak ada item ganda yang ditampilkan pada visualisasi di atas. Item identik yang muncul dibanyak artikel dihitung sebagai item tunggal (Gaviria-Marín et al., 2019). Visualisasi ini merepresentasikan item dengan label dan lingkaran. Ukuran label dan lingkaran tersebut ditentukan oleh bobotnya masing-masing. Semakin sering kemunculan suatu item maka semakin besar pula label dan lingkaran yang dihasilkan (Gaviria-Marín et al., 2019). Garis antar item mewakili tautan dan letak setiap item menunjukkan keeratan keterkaitannya (Ham, Koo, & Lee, 2019; Lnenicka & Saxena, 2021). Item yang mendominasi dapat dilihat pada gambar 2, kluster item dapat dilihat pada gambar 3, dan item tahun terbaru dapat dilihat pada gambar 4.

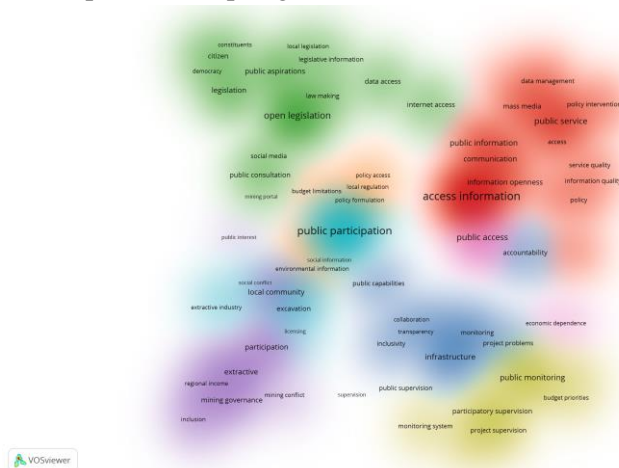


Gambar 2. Dominasi Item

(Sumber: Diproses oleh Penulis)

Pada gambar di atas, warna biru menunjukkan total kekuatan link suatu item, sedangkan warna merah menunjukkan total kemunculan suatu item disemua artikel. Terdapat 2646 total link strength dan 668 occurrences pada artikel open government Cotabato Selatan. Access information (Total link strength 254 dan Occurrences 64), public participation (Total link

strength 223 dan Occurrences 56), open legislation (Total link strength 119 dan Occurrences 30), public access (Total link strength 96 dan Occurrences 24), public service (Total link strength 86 dan Occurrences 22), infrastructure (Total link strength 60 dan Occurrences 15), public monitoring (Total link strength 59 dan Occurrences 15), public information (Total link strength 58 dan Occurrences 15), information openness (Total link strength 56 dan Occurrences 14), dan extractive (Total link strength 56 dan Occurrences 14) merupakan daftar topik yang mendominasi pada studi ini. Topik-topik tersebut paling banyak digunakan para peneliti dan menjadi fokus utama pada studi open government Cotabato Selatan.



Gambar 3. Density Visualizatio

(Sumber: Diproses oleh Penulis)

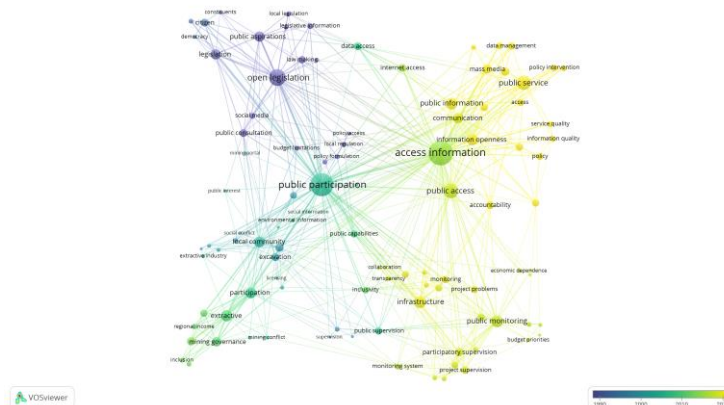
Seratus tiga topik ditemukan pada artikel open government Cotabato Selatan. Topik-topik tersebut terbagi menjadi sembilan cluster dengan jumlah yang beragam. Klaster topik ini terbentuk berdasarkan garis penghubung antar topik (gambar 1) sehingga setiap topik pada cluster yang sama memiliki keterkaitan yang sangat erat. Topik-topik pada klaster satu yakni policy making, information, information quality, service quality, access, policy, policy intervention, public dialogue, data management, development project, interactive, policy allocation, public policy, mass media, communication, information openness, public information, public service, dan access information.

Topik-topik pada klaster dua yakni mining portal, constituents, decision making, democracy, legislative data, local legislation, political process, legislative information, social media, law making, citizen, data access, internet access, public consultation, legislation, public aspirations, dan open legislation. Topik-topik pada klaster tiga yakni civil society, collaboration, secretariat process, strategic projects, transparency, evaluation, inclusivity, project monitoring, project problems, monitoring, public capabilities, accountability, dan infrastructure.

Topik-topik pada klaster empat yakni central funds, budget priorities, regional funds, infrastructure projects, monitoring process, open data kit, update data, monitoring system, project status, project quality, project supervision, participatory supervision, dan public monitoring. Topik-topik pada klaster lima yakni culture, public interest, mining conflict, inclusion, local economy, regional income, environmental protection, social protection, mining governance, local community, participation, dan extractive.

Topik-topik pada klaster enam yakni licensing, production information, public capacity, social conflict, contract, extraction information, extractive industry, industry information,

environmental degradation, excavation, mining, dan public participation. Topik-topik pada kluster tujuh yakni economic information, social information, environmental information, policy access, budget limitations, local regulation, policy formulation, public involvement, and public awareness. Topik-topik pada kluster delapan yakni illegal extractives, supervision, illegal mining, dan public supervision. Sedangkan topik-topik pada kluster sembilan yakni basic services, social services, economic dependence, dan public access.



Gambar 4. Overlay Visualization
(Source: Processed by the Author)

Visualisasi di atas identik dengan visualisasi jaringan (Gambar 1) kecuali pada warna setiap item. Pada visualisasi ini, warna berkisar dari biru (skor terendah), hijau (skor menengah), hingga kuning (skor tertinggi). Semakin gelap warna suatu item maka semakin tertinggal, sebaliknya semakin kuning menunjukkan suatu item sedang mendapat perhatian. Topik-topik yang sedang mendapat perhatian yakni public service, service quality, access, public information, communication, interactive, information openness, information quality, accountability, monitoring, dan evaluation. Topik-topik tersebut memungkinkan penelitian potensial di masa yang akan datang.

Komitmen Cotabato Selatan

Menjadi salah satu dari lima belas pemerintah local yang dipilih pada program percontohan pemerintah daerah OGP, Cotabato Selatan telah menetapkan empat komitmen dalam mendukung implementasi open government di daerah tersebut. *Pertama*, open legislation. Dalam demokrasi, keterlibatan warga negara dalam proses politik sangatlah penting. Saat ini, keterlibatan warga negara masih terbatas karena para konstituen mempunyai pengetahuan yang terbatas mengenai langkah-langkah legislative, terutama karena dengar pendapat publik tidak wajib untuk semua langkah legislatif. Untuk tindakan legislasi yang memerlukan konsultasi publik, hanya sebagian kecil penduduk lokal yang terjangkau karena keterbatasan dana dalam mengirimkan komunikasi dan melakukan pertemuan tatap muka.

Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat bahwa mereka sebenarnya bisa dilibatkan dalam perumusan kebijakan dan peraturan daerah, serta cara mengakses kebijakan menjadi masalah utama. Selain itu, catatan peraturan perundang-undangan juga tidak mudah diakses dan tersedia baik secara offline maupun online. Semua ini menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan pada saat pembuatan undang-undang. Sementara mereka yang sadar akan haknya untuk berpartisipasi atau mengakses informasi legislatif kehilangan minat karena tidak jelasnya proses dalam

menyuarakan pendapat.

Komitmen ini bertujuan untuk menciptakan lebih banyak ruang bagi keterlibatan masyarakat guna meningkatkan proses legislasi daerah melalui saluran online, sehingga meningkatkan relevansi peraturan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan permasalahan pembangunan. Ini akan dilakukan dengan terlebih dahulu membuat Sistem Teknologi Informasi Legislatif. Sistem tersebut berfungsi sebagai basis data untuk catatan legislatif dimana masyarakat dapat dengan mudah mencari kebijakan dan peraturan saat ini dan yang sedang berjalan/yang tertunda.

Basis data legislatif ini juga akan dihubungkan dengan Basis Data Online Provinsi sehingga dapat diakses oleh masyarakat kapan saja secara online. Platform online juga mencakup pembuatan Facebook resmi dan menghubungkannya ke situs web resmi dimana siapa pun dapat menyarankan kebijakan dan peraturan baru serta memberikan komentar mengenai kebijakan dan peraturan yang sudah ada. Ini akan menjadi platform bagi masyarakat umum untuk mengusulkan ide-ide mengenai peraturan perundang-undangan baru, dan memberikan umpan balik mengenai kebijakan dan peraturan daerah yang ada. Ini akan menjadi tambahan dari konsultasi publik tatap muka yang saat ini dilakukan.

Membangun saluran online untuk menyebarkan dan berkonsultasi dengan warga mengenai proses dan langkah-langkah legislatif akan memperluas keterlibatan warga dalam legislasi dan memastikan pengesahan dan penerapan undang-undang relevan yang efektif menanggapi isu-isu nyata dan permasalahan pembangunan di masyarakat. Komitmen ini berpotensi memiliki dampak terhadap peningkatan keterlibatan masyarakat dan akses terhadap informasi dalam proses legislatif daerah.

Bergantung pada protokol yang rumit, dengar pendapat publik secara offline, dan prosedur manual untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat mengenai usulan undang-undang, proposisi komitmen untuk menyediakan platform online untuk pencatatan legislatif, dan membangun saluran media sosial untuk partisipasi warga dalam pembuatan undang-undang, mewakili sebuah langkah maju yang besar dalam keterlibatan masyarakat dan akses terhadap informasi legislatif. Namun, karena tidak semua wilayah memiliki akses internet yang baik, ketergantungan komitmen ini pada platform online membuat cakupan komitmen ini masih terbatas.

Kedua, *Public participation in extractives*. Akses yang tidak memadai dan informasi yang salah mengenai kegiatan pertambangan dan penggalian sama dengan hilangnya pendapatan, degradasi lingkungan, dan konflik sosial. Seringkali, masyarakat yang berada di sekitar kegiatan penambangan dan penggalian ilegal akan menganggap operasi tersebut biasa saja sampai masyarakat tersebut terkena dampak langsung dari praktik-praktik tersebut atau jika penambangan ilegal telah ditangkap oleh pihak yang berwenang. Selain terbatasnya tenaga pemerintah untuk memantau kegiatan ilegal ini, partisipasi masyarakat dalam memantau dan melaporkan kegiatan ekstraktif ilegal juga rendah karena tidak memiliki akses dan kapasitas untuk memahami informasi pertambangan dan penggalian.

Masyarakat masih kurang mengapresiasi informasi industri ekstraktif karena angka-angka tersebut tidak diterjemahkan ke dalam sesuatu yang dapat mereka kaitkan atau sesuatu yang penting bagi mereka, misalnya, informasi mengenai jumlah produksi/ekstraksi diubah menjadi pendapatan nyata atau manfaat bagi masyarakat tuan rumah. Hal ini diperburuk dengan degradasi lingkungan hidup dan konflik dalam penerapan hak pertambangan dan penggalian. Saat ini, terdapat banyak operator tambang dengan izin reguler dan khusus yang beroperasi di

wilayah Masyarakat Adat. Area tersebut masuk ke dalam wilayah kontrak Perjanjian Bagi Hasil Tambang.

Komitmen ini akan berfokus pada pengembangan kebijakan dan penciptaan sistem dan saluran elektronik yang transparan untuk lebih melibatkan masyarakat agar berpartisipasi dalam tata kelola pertambangan, sehingga meningkatkan inklusi khususnya kelompok minoritas di wilayah pertambangan. Akses terhadap informasi pertambangan dan penggalian akan ditingkatkan melalui portal pertambangan online yang akan dikembangkan dan dihubungkan dengan website pemerintah provinsi, Interactive Province Online Database, dan media sosial, untuk mendorong interaksi publik. Konsultasi dengan pemangku kepentingan akan dilakukan mengenai data apa yang merupakan kepentingan publik, relevansi, dan daya tarik yang perlu diungkapkan. Partisipasi OMS di Badan Pengatur dan Pertambangan Provinsi (PMRB) akan diperluas hingga mencakup partisipasi masyarakat akar rumput.

Melalui portal, standar, saluran, dan branding online berbasis teknologi dan partisipatif, akan ada peningkatan keterbukaan informasi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi, sehingga memperkuat kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait industri ekstraktif. Hal ini akan menghasilkan peningkatan akses terhadap informasi dan partisipasi masyarakat akar rumput dalam tata kelola pertambangan khususnya Masyarakat Adat dimana wilayah pertambangan berada, meminimalkan perselisihan dan konflik terkait pertambangan dan penggalian, dan tumbuhnya budaya dengan sistem pemantauan yang melibatkan masyarakat. Konsekuensinya, semua hal ini dapat meningkatkan pengumpulan pendapatan, memberikan peningkatan peluang ekonomi lokal, meningkatkan inklusi dalam tata kelola pertambangan, dan mendorong perlindungan sosial budaya dan lingkungan di wilayah yang terkena dampak.

Komitmen ini berpotensi meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam tata kelola pertambangan dan peningkatan akses terhadap informasi. Penggunaan teknologi dan sistem, standar, dan branding berbasis partisipatif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dapat meminimalkan perselisihan dan konflik, meningkatkan pengumpulan dan pembagian pendapatan antara unit provinsi dan subprovinsi, serta mendorong perlindungan sosial budaya dan lingkungan. Peningkatan keanggotaan PMRB, termasuk partisipasi akar rumput, dapat meningkatkan platform keterlibatan dimana diskusi dan permasalahan dapat ditangani secara kolaboratif dan konstruktif. Secara kolektif, inisiatif-inisiatif ini merupakan sebuah langkah maju yang besar.

Ketiga, Public Monitoring of Infrastructure. Setiap tahunnya, pemerintah melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang bersumber dari dana daerah maupun pusat. Proyek infrastruktur biasanya mendapat porsi besar dari anggaran. Namun, banyak proyek infrastruktur mengalami keterlambatan pelaksanaan dan penyelesaian, kualitas buruk, dan pemanfaatan dana yang buruk. Oleh karena itu, pemantauan terhadap proyek-proyek ini harus dilakukan secara teratur, efisien, transparan, dan partisipatif. Demikian pula, hasil pemantauan harus tersedia bagi masyarakat untuk mendapatkan umpan balik. Namun saat ini hasil pemantauan hanya terbatas pada anggota Pemantau Proyek Provinsi (PPMC) dan Dewan Pembangunan Provinsi sehingga masyarakat umum tidak mengetahui status proyek secara real-time.

Kondisi tersebut membuat masyarakat mempunyai kesempatan yang terbatas untuk memberikan umpan balik mengenai status proyek yang sebenarnya (misalnya keterlambatan pelaksanaan, *kualitas* bahan yang buruk atau penggunaan dana yang buruk) atau apakah rekomendasi yang tercermin pada hasil pemantauan dilaksanakan oleh pemerintah.

Permasalahan dalam pemantauan dan pelaksanaan proyek infrastruktur berdampak terhadap penerima manfaat, terutama dalam meningkatkan mobilitas orang, barang dan jasa, meningkatkan akses masyarakat pedesaan yang tertinggal, miskin, dan terisolasi secara geografis terhadap layanan sosial dasar, serta mendukung saling ketergantungan ekonomi antara masyarakat pedesaan dan perkotaan.

Komitmen ini mencakup upaya menjadikan hasil pemantauan PPMC lebih terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum dengan mempostingnya kepada masyarakat umum untuk memberikan umpan balik atau mengakses hasil pemantauan. Hal ini mencakup pemaparan hasil pemantauan ke situs web pemerintah provinsi sehari setelah pelaksanaan pemantauan triwulanan PPMC untuk memberikan status proyek yang hampir real-time kepada publik. Dengan demikian, PPMC akan mengadopsi Open Data Kit atau sistem pemantauan proyek berbasis seluler untuk memantau proyek hampir secara real-time. Komitmen ini juga mencakup pemutakhiran situs web pemerintah provinsi serta halaman facebooknya untuk memuat hasil pemantauan proyek oleh masyarakat untuk mendapatkan rekomendasi. Masyarakat umum juga mempunyai kesempatan untuk mengunggah gambar proyek yang sedang berjalan di komunitas mereka dan memposting status proyek tersebut secara online. Komitmen ini juga akan meningkatkan proses pemantauan dan komposisi PPMC untuk memperkuat keterlibatan masyarakat atau komunitas yang terkena dampak langsung.

Komitmen ini dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat dan organisasi masyarakat sipil untuk berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dalam mengatasi permasalahan pelaksanaan proyek seperti penundaan, buruknya kualitas proyek, dan buruknya pemanfaatan dana. Partisipasi dalam proses ini dapat memungkinkan masyarakat untuk memberikan umpan balik guna meningkatkan pelaksanaan proyek. Ketika temuan pemantauan dan rekomendasi dipublikasikan, kontraktor dan pejabat pemerintah terkait akan bertanggung jawab atas keterlambatan proyek atau ketidakpatuhan lembaga terkait lainnya terhadap rekomendasi dalam laporan. Sejalan dengan hal ini, mekanisme penanganan keluhan yang ada (misalnya memasukkan kontraktor ke dalam daftar hitam atau mengajukan kasus) di provinsi ini akan diperkuat untuk memastikan akuntabilitas.

Komitmen ini dapat meningkatkan proses pemantauan dan evaluasi pemerintah, dengan memperkuat keterlibatan PPMC dengan masyarakat. Inisiatif ini dapat menjadi langkah maju yang besar dalam pemantauan proyek yang inklusif. Saat ini, laporan pemantauan dan evaluasi harus melalui proses sekretariat yang memakan waktu, sehingga dapat menghambat pertimbangan tepat waktu PPMC mengenai proyek-proyek penting. Sebaliknya, akses masyarakat terhadap hasil pemantauan proyek yang hampir real-time, seperti yang diharapkan melalui komitmen ini, dapat secara signifikan mengurangi buruknya pelaksanaan proyek. Hal ini akan semakin ditingkatkan dengan kemampuan masyarakat untuk secara proaktif memberikan umpan balik dan komentar, serta melaporkan pelaksanaan infrastruktur. Transparansi, serta peningkatan kolaborasi pemerintah dan masyarakat sipil, dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi pada setiap tahap pelaksanaan proyek.

Keempat, Access to information. Di antara faktor-faktor lainnya, terbatasnya akses terhadap informasi pemerintah sangat menghambat pemberian layanan dan intervensi yang tepat untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Akses terhadap informasi yang benar memiliki hubungan yang langsung dan menguatkan dalam memastikan pemberian intervensi dan layanan yang tepat kepada masyarakat. Meskipun Cotabato Selatan sudah mematuhi Kebijakan Keterbukaan Informasi Penuh yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah, pemerintah provinsi belum memiliki kebijakan keterbukaan informasi yang disederhanakan. Permintaan khusus atas informasi umumnya dipenuhi setelah diterima, dan pengungkapan proaktifnya terbatas.

Pemerintah telah menetapkan mekanisme untuk menerima dan menindaklanjuti permintaan informasi dari masyarakat, dan menunjuk Petugas Informasi Provinsi (PIO) yang berdedikasi untuk memproses dan menindaklanjuti permintaan tersebut secara manual. Namun, dalam praktiknya, akses terhadap informasi seringkali ditentukan oleh kehadiran fisik warga dan bahkan kedekatannya dengan ibu kota provinsi dimana permohonan diajukan ke PIO. Terhadap informasi yang tidak dimuat secara rutin di fasilitas umum, atau disiarkan melalui media cetak, radio, atau televisi, sehingga warga harus menulis surat kepada instansi pemerintah terkait dan menunggu keputusan persetujuan. Informasi untuk menanggapi permintaan semacam ini sering kali harus diteruskan dari kantor provinsi, regional, atau nasional lainnya.

Komitmen ini bertujuan untuk membangun saluran online dan offline untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi pemerintah, dan memungkinkan masyarakat memberikan masukan terhadap program dan layanan pemerintah. Kualitas informasi yang lebih banyak dan lebih baik akan diungkapkan untuk mencakup tidak hanya informasi yang diwajibkan berdasarkan Kebijakan Pengungkapan Penuh Filipina dan data dasar mengenai profil sosio-ekonomi provinsi tersebut, namun juga informasi mengenai program, proyek, atau layanan dan laporan pemantauan proyek.

Hal ini mencakup pengembangan platform online interaktif bagi masyarakat umum untuk mengakses, melihat, menyimpan dan mencetak data dan informasi pemerintah mengenai program dan layanan langsung di rumah mereka secara gratis, dengan fitur khusus bagi masyarakat umum untuk memberikan masukan mereka mengenai layanan dan program pemerintah. Bagian dari komitmen tersebut mencakup penyelenggaraan lokakarya untuk mengembangkan mekanisme dalam menanggapi masukan dari masyarakat. Komitmen ini juga mencakup pelokalisasian kebijakan pemerintah pusat mengenai Kebebasan Informasi melalui peraturan daerah, dan pelebagaan hak masyarakat atas informasi.

Sebagai mekanisme offline, program partisipasi masyarakat secara langsung akan diluncurkan untuk masyarakat yang tidak memiliki akses internet, dimana pertanyaan warga kepada Gubernur akan direkam selama pelaksanaan Program Penjangkauan mingguan kepada masyarakat miskin dan terpencil dimana pemerintah provinsi menghadirkan pelayannya langsung kepada masyarakat, dan tanggapan Gubernur terhadap pertanyaan-pertanyaan ini akan direkam dan disiarkan melalui program radio resmi provinsi setiap minggu dan pada tanggal tertentu yang akan diumumkan kepada masyarakat.

Komitmen ini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap data dan informasi pemerintah, dan memungkinkan adanya umpan balik terhadap program dan layanan pemerintah, dengan membangun platform online dan offline untuk dialog masyarakat, lokakarya pelatihan mengenai pengelolaan data, dan menciptakan peraturan daerah yang memungkinkan untuk melembagakan komitmen tersebut. Penerapan gabungan berbagai saluran media dapat memicu putaran umpan balik yang dapat menghubungkan masyarakat dengan pejabat di tingkat provinsi, kota, dan bahkan desa, serta membantu pembuat kebijakan merancang layanan yang lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Tabel 1. Komitmen Cotabato Selatan

No	Komitmen	Potensi Kebijakan
1	Open legislation	Menciptakan lebih banyak ruang bagi keterlibatan masyarakat guna meningkatkan proses legislasi daerah melalui saluran online, sehingga meningkatkan relevansi peraturan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan permasalahan pembangunan.
2	Public participation in extractives	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam tata kelola pertambangan dan peningkatan akses terhadap informasi. Penggunaan teknologi dan sistem, standar, dan branding berbasis partisipatif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dapat meminimalkan perselisihan dan konflik, meningkatkan pengumpulan dan pembagian pendapatan antara unit provinsi dan sub-provinsi, serta mendorong perlindungan sosial budaya dan lingkungan.
3	Public Monitoring of Infrastructure	Memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat dan organisasi masyarakat sipil untuk berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dalam mengatasi permasalahan pelaksanaan proyek seperti penundaan, buruknya kualitas proyek, dan buruknya pemanfaatan dana. Partisipasi dalam proses ini dapat memungkinkan masyarakat untuk memberikan umpan balik guna meningkatkan pelaksanaan proyek. Sejalan dengan hal ini, mekanisme penanganan keluhan (misalnya memasukkan kontraktor ke dalam daftar hitam) diperkuat sehingga memastikan akuntabilitas.
4	Access to information	Meningkatkan akses masyarakat terhadap data dan informasi pemerintah, dan memungkinkan adanya umpan balik terhadap program dan layanan pemerintah, dengan membangun platform online dan offline untuk dialog masyarakat, lokakarya pelatihan pengelolaan data, dan menciptakan peraturan daerah. Penerapan gabungan berbagai saluran media dapat memicu putaran umpan balik yang dapat menghubungkan masyarakat dengan pejabat di tingkat provinsi, kota, dan bahkan desa, serta membantu pembuat kebijakan merancang layanan yang lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat.

(Sumber: Pemerintah Cotabato Selatan)

KESIMPULAN

Studi open government Cotabato Selatan telah diminati, memiliki dampak, dan memiliki produktivitas yang tinggi. Ini tampak dari ditemukannya 127 artikel relevan, 683 sitasi, 13 h-index, dan 24 g-index. Terdapat pula 2646 total link strength, 668 occurrences, 103 topik, dan 9 klaster pada studi ini. Topik-topik yang mendominasi pada studi ini diantaranya yakni access information, public participation, open legislation, public access, dan public service. Sedangkan public service, service quality, access, public information, dan communication merupakan

beberapa topik studi yang potensial di masa mendatang. Ini menjadi rekomendasi bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam temuan saat ini.

Cotabato Selatan merupakan satu di antara belasan pemerintah local di dunia yang terpilih pada program percontohan pemerintah daerah Open Government Partnership. Sebagai bentuk keserius pemerintah dalam mengimplementasikan program tersebut, Cotabato Selatan telah menetapkan empat komitmen yang meliputi open legislation, public participation in extractives, public monitoring of infrastructure, dan access to information. Komitmen-komitmen tersebut apabila diimplementasikan secara optimal berpotensi untuk mendorong Cotabato Selatan menjadi lebih terbuka.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti berterimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap penelitian ini, terutama dukungan yang sangat berharga dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

REFERENSI

- Afandi, S. A. (2024). *Local Open Government: Strategi Reformasi Administrasi Publik*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Afandi, S. A., Afandi, M., & Anugerah, M. F. (2023). *Open Government*. Kediri: Kreator Cerdas Indonesia.
- Afandi, S. A., Afandi, M., & Erdayani, R. (2023). Local Open Government: Studies in West Nusa Tenggara, Indonesia. *Jurnal Administrative Reform*, 11(2), 85–98.
- Afandi, S. A., Afandi, M., Erdayani, R., & Afandi, N. H. (2023). Indonesia's Open Government: A Bibliometric Analysis. *Journal of Governance and Social Policy*, 3(1), 1–23.
- Afandi, S. A., Erdayani, R., & Afandi, M. (2023). Open Government: A Bibliographic Study of The Semarang and Gwangju Experiences. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 6(2), 217–234.
- Afandi, S. A., Erdayani, R., & Afandi, M. (2024). Open Parliament: Study from Indonesia and Philippines. *Journal of Governance and Social Policy*, 5(1), 126–147.
- De Blasio, E., & Selva, D. (2019). Implementing open government: a qualitative comparative analysis of digital platforms in France, Italy and United Kingdom. *Quality and Quantity*, 53(2), 871–896.
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to Conduct a Bibliometric Analysis: An Overview and Guidelines. *Journal of Business Research*, 133(1), 285–296.
- Erdayani, R., Afandi, M., & Afandi, S. A. (2023). Bibliometric Analysis of Open Government: A Study on The Open Government Partnership. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 3(2), 76-89.
- Gao, Y., Janssen, M., & Zhang, C. (2021). Understanding the Evolution of Open Government Data Research: Towards Open Data Sustainability and Smartness. *International Review of Administrative Sciences*, 10(1), 1–17.
- Gaviria-Marin, M., Merigó, J. M., & Baier-Fuentes, H. (2019). Knowledge management: A global examination based on bibliometric analysis. *Technological Forecasting and Social Change*, 140(12), 194–220.
- Gil-Garcia, J. R., Gasco-Hernandez, M., & Pardo, T. A. (2020). Beyond Transparency,

- Participation, and Collaboration? A Reflection on the Dimensions of Open Government. *Public Performance & Management Review*, 43(3), 483–502.
- Ham, J., Koo, Y., & Lee, J. N. (2019). Provision and Usage of Open Government Data: Strategic Transformation Paths. *Industrial Management and Data Systems*, 119(8), 1841–1858.
- Ingrams, A. (2020). Administrative Reform and the Quest for Openness: A Popperian Review of Open Government. *Administration and Society*, 52(2), 319–340.
- Ingrams, A., Piotrowski, S., & Berliner, D. (2020). Learning from Our Mistakes: Public Management Reform and the Hope of Open Government. *Perspectives on Public Management and Governance*, 3(4), 257–272.
- Kamaruddin, & Afandi, S. A. (2024). Anti-corruption Policy Analysis: Indonesian Open Government Study. *IAPA 2023 Annual International Conference*, 572–589.
- Kulsum, U., Nurmandi, A., Isnaini, Muallidin, Jafar, M., Loilatu, & Kurniawan, D. (2022). A Bibliometric Analysis of Open Government: Study on Indonesia and Philippines. *Journal of Governance*, 7(1), 133–143.
- Lnenicka, M., & Saxena, S. (2021). Re-Defining Open Government Data Standards for Smart Cities' Websites: A Case Study of Selected Cities. *Digital Policy, Regulation and Governance*, 23(4), 398–411.
- Moon, M. J. (2020). Shifting from Old Open Government to New Open Government: Four Critical Dimensions and Case Illustrations. *Public Performance and Management Review*, 43(3), 535–559.
- Moral-Muñoz, J. A., Herrera-Viedma, E., Santisteban-Espejo, A., & Cobo, M. J. (2020). Software Tools for Conducting Bibliometric Analysis in Science: An Up-to-date Review. *Multidisciplinar*, 29(1), 629–635.
- Ruijter, E., Détienne, F., Baker, M., Groff, J., & Meijer, A. J. (2020). The Politics of Open Government Data: Understanding Organizational Responses to Pressure for More Transparency. *The American Review of Public Administration*, 50(3), 156–172.
- Ruijter, E., & Meijer, A. (2020). Open Government Data as an Innovation Process: Lessons from a Living Lab Experiment. *Public Performance & Management Review*, 43(3), 613–635.
- Schmidhuber, L., & Hilgers, D. (2021). Trajectories of local open government: An empirical investigation of managerial and political perceptions. *International Public Management Journal*, 24(4), 537–561.
- Subedi, R., Nyamasvisva, T. E., & Pokharel, M. (2022). An Integrated-Based Framework For Open Government Data Adoption In Kathmandu. *Webology*, 19(2), 7936–7961.
- Tai, K.T. (2021). Open government research over a decade: A systematic review. *Government Information Quarterly*, 38(2), 796–811.
- Wang, V., & Shepherd, D. (2020). Exploring the extent of openness of open government data – A critique of open government datasets in the UK. *Government Information Quarterly*, 37(1), 1035–1050.
- Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., & Sch, M. R. (2019). Open government and citizen participation: an empirical analysis of citizen expectancy towards open government data. *International Review of Administrative Sciences*, 85(3), 566–586.
- Zulfa, R. G., & Afandi, S. A. (2023). Analisis Open Government Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 3(2), 57–62.